**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong otoaktivitas masyarakat untuk melaksanakan sendiri yang dianggap penting bagi lingkungannya. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi, maka rakyat tidak saja dapat menentukan sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerah melalui berbagai aktivitas pembangunan.

Keputusan yang diambil oleh negara mempunyai akibat-akibat terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Ada segi yang tidak boleh dilanggar atau dikorbankan oleh negara. Oleh sebab itulah diperlakukan prinsip-prinsip etis yang mendasari setiap penyelenggaraan negara tidak lagi dapat sewenang-wenang tetapi harus dapat membuktikan diri bahwa mereka memiliki pendasaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara etis. Dengan demikian kekuasaan negara mencari legitimasi yang benar dan mempersulit merajalelanya legitimasi-legitimasi ideologis Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya adalah pembagian tugas dan wewenang secara bertangung jawab. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pelayanan yang semakin dekat dan mudah bagi masyarakat.